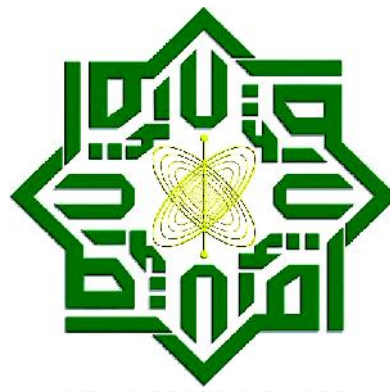


**TINJAUAN TERHADAP UNDANG UNDANG DESA NOMOR 6 TAHUN 2014
DI DESA PARITBARU KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN
KAMPAR (PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN
ASPIRASI MASYARAKAT)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



UIN SUSKA RIAU

OLEH

ALVIZAR
NIM. 11127101307

PROGRAM S1

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

1437 H/2015 M



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas KM 15 tampan pekanbaru-Riau No.telp 0761-28293
Fax. 0761-21129, Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail : iain-sq@pekanbaru.ino.net.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi ini berjudul: "TINJAUAN TERHADAP UNDANG UNDANG DESA
NOMOR 6 TAHUN 2014 DI DESA PARITBARU KECAMATAN TAMBANG
KABUPATEN KAMPAR (PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT)" yang
ditulis oleh :

Nama : ALVIZAR
Nim : 11127101307
Jurusan : ILMU HUKUM

Telah dimunaqasahkan dalam sidang panitia sarjana program Strata Satu (S1) pada
Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 03 Desember 2015

Sehingga dapat diterima dan disahkan oleh Fakultas Syari'ah Dan Hukum sebagai
salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).



Pekanbaru, 08 Desember 2015

Dekan

Dr.H.AKBARIZAN, M.Ag.M.Pd
NIP. 19711001 199503 1002

PANITIA UJIAN SARJANA

Ketua

Dr.H.AKBARIZAN, M.Ag.M.Pd
NIP. 19711001 199503 1002

Penguji I

FEBRI HANDAYANI, SHI, MH
NIP. 19830208 200801 2 012

Sekretaris

HENDRI SAYUTI, M.Ag
NIP. 1976082 200312 1 003

Penguji II

H. AZWAR AZIZ, SH, M.Si
NIP. 195108161971061001

ABSTRAK

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wujud dari Demokrasi di tingkat Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwasanya BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Adanya aturan hukum mengenai pemerintahan desa yang belum membuahkan hasil atas apa yang semestinya diharapkan dari peraturan hukum dan undang-undang. Sistem pemerintahan desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sering kali terabaikan oleh perangkat-perangkat desa yang terkait didalamnya, khususnya Badan Permusyawaratan Desa. Banyaknya hak-hak masyarakat yang belum terlaksanakan dengan baik menjadi tanggungjawab yang besar bagi BPD sebagai wakil dari masyarakat untuk mewujudkannya. Penelitian yang berjudul: **“TINJAUAN TERHADAP UNDANG UNDANG DESA NOMOR 6 TAHUN 2014 DI DESA PARITBARU KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR (PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT)”**. Maka patut dikaji karena peneliti ingin mengetahui bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Paritbaru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan cara mengkaji data dan fakta yang terjadi selama ini. Adapun yang menjadi pokok permasalahan yang akan diteliti oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, Bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat ditinjau dari Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Paritbaru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, kemudian apa saja yang menjadi Kendala bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta apa upaya dari BPD Desa Paritbaru dalam mengatasi masalah yang dialami dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian Sosiologis yakni dengan cara melakukan Survey dengan cara turun langsung kelapangan yang berkenaan dengan permasalahan yang akan diteliti. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwasanya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Paritbaru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 serta belum Optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, banyaknya hak-hak masyarakat yang belum terlaksanakan serta tidak adanya PERDES yang dihasilkan semenjak desa ini berdiri serta prosedur yang jelas dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat membuat masyarakat kesulitan untuk menyampaikan aspirasinya. Adapun kendala yang dihadapi BPD adalah faktor sumber daya manusia (SDM), komunikasi, finansial, adapun upaya yang dilakukan adalah, melaksanakan musyawarah dengan mengikut sertakan masyarakat, serta harus transparansi dalam menampung aspirasi masyarakat dengan cara bertatap muka secara langsung baik personal maupun bersama.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillah segala puja dan puji syukur penulis persembahkan ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat dan rahmatnya, yang telah memberikan kesehatan lahir dan bathin kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: **“TINJAUAN TERHADAP UNDANG UNDANG DESA NOMOR 6 TAHUN 2014 DI DESA PARITBARU KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR (PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT)”**. untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Kasim Riau.

Dalam melakukan penulisan dan penelitian skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan, motivasi serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini.

Kemudian dari pada itu penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada:

1. Sembah sujud penulis teristimewakan serta ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada mereka yang tersayang dan terhormat Ayahanda H. Abuyaziddan Ibunda Hj. Marhamah yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, membimbing dengan penuh pengorbanan, panas terik, dan hujan rintik pun tak dirasakan oleh mereka.

Sungguh mulia pengorbananmu, dengan kesabaran, ketabahan, kasih sayang, do'a serta dukungan untuk keberhasilan Ananda.

2. Bapak Prof. Dr. H.Munzir Hitami, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr.H.Akbarizan, M.Ag, M.Pd selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dr.Hj. Hertina,M.Pd, selaku Wakil Dekan II yang banyak memberikan bimbingan dan masukan untuk kelancaran penulisan skripsi ini.
5. Ibu Hj. Nuraini Sahu, SH., MH, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum yang telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak H.Azwar Aziz, SH., M.Siselaku Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, serta memberikan pengarahan serta petunjuk kepada penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang selam ini telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.

8. Kakakku Nurmayanti S.Pd.I, abangku Usman S.Sos, M.Ikom dan Lukmanul Hakim S.Ud, M.IRKH serta adikku tersayang Abdul Ghafur. Terimakasih atas dukungan, do'a, motivasi serta moril dan materil yang telah diberikan selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
9. Siti Hardiyanti yang telah banyak memberikan inspirasi dan motivasi kepada penulis sertakenyamanan hatisehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Muhammad Abrar, S.Ud, Muhammad Akbar, Sholihin, Syahrul Aidi, serta sahabatku yang Super Riki Hidayat yang telah memberikan dukungan semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
11. Buat seluruh pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Tahun 2014/2015 Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Buat teman sejawat sertaseperjuangan Fakultas Syariah dan Hukum Mustofa Zohri, Mukhlis Wardana, Marwan, Heri Candra Kirana, Zainal Abidin, Syarif Hidayatullah, Refni Dwita, Wahyuni Rusli SE., Sy, Efni Malinda dan seluruh teman-teman jurusan Ilmu Hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan semangat dan motivasi, serta untuk keceriaan yang kalian berikan tak pernah terlupakan.

13. Terimakasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan telah meluangkan waktu dan telah memberikan motivasi kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan/penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu sarandan kritikan yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi setiap pembaca, Amin. *Akhirul kalam syukron wa jazakumullah.*

Pekanbaru, 05 November 2015

Penulis

ALVIZAR
NIM. 11127101307

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PENGESAHAN PEMBIMBING

PENGESAHAN SKRIPSI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teoritis	8
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	20
A. SejarahDesaParitbaru	20
B. KeadaanEkonomi.	23
C. StukturPemerintahanDesa	25
BAB III: TINJAUAN TEORITIS.....	31
A. DesaMenurutUndangUndangNomor6Tahun2014	31
B. KedudukanJenisDesa.....	33
C. PenyelenggaraanPemerintahDesa	35

D. Sejarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	45
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Paritbaru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar	49
B. Kendala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Paritbaru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. ...	54
C. Upaya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menghadapi Kendala, Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Paritbaru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar ...	56
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	60
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
IV.1 Tanggapan Responden tentang tugas dan fungsi BPD	50
IV.2 Tanggapan Responden tentang BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya	51
IV.3 Tanggapan Responden tentang kendala dalam menyampaikan aspirasi masyarakat	54
IV.4 Tanggapan Responden tentang BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat	57
IV. 5 Tanggapan Responden tentang kinerja BPD selamaini	58